

**BAB IV**

**KEBIJAKAN LUAR NEGERI CHINA DI MYANMAR SEBAGAI  
PRODUK POLITIK HEGEMONI**

Berbicara mengenai hegemoni, tentu lekat pemikiran kita dengan dua negara superpower yang bersaing sejak era Perang Dingin di tahun 1947, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pecahnya Uni Soviet pasca perang tersebut mengukuhkan keberadaan Amerika sebagai negara superpower yang memiliki kekuasaan hegemoni di berbagai wilayah. Namun mulai era tahun 2000-an muncul kekuatan baru dalam dunia internasional yang mulai menggeser peran Amerika dan hegemoninya. China menjadi negara yang perkembangannya cukup pesat dan menarik perhatian publik. Semakin aktif China dalam aktivitas multilateral dunia dan bergabungnya dalam organisasi-organisasi dunia mulai menjadi tanda akan kemunculan hegemoni baru dalam dunia internasional. Tanda kekuatan hegemoni baru China inipun memberi dampak tersendiri bagi negara-negara di sekitarnya termasuk Myanmar. Myanmar yang saat ini sedang mengalami cukup banyak konflik mulai dari demokrasi, etnis, tekanan dunia internasional pun menjadi tantangan China sebagai kekuatan dunia yang baru. Bab ini akan menjelaskan lebih lanjut mulai dari munculnya hegemoni China hingga terciptanya kebijakan politik luar negeri yang ditujukan khusus untuk Myanmar.

## A. Hegemoni dengan perspektif China

Konsep hegemoni pertama kali dikemukakan oleh Antonio Gramsci di dalam bukunya, *“Selections From The Prison Notebooks”*. Menurut Gramsci : (Parkash, 2016)

*“hegemony is the nexus of a material and ideological instruments through which the dominant classes maintain their power .. dominant classes maintain their position not only through act of coercion but also symbolic action”*

Hal ini sesuai dengan fenomena bangkitnya China saat ini yang memanfaatkan gabungan antara aspek material berupa kekuatan ekonomi dan ideologi politik hingga menjadi salah satu negara yang dinilai telah mendominasi dunia internasional. Gramsci pun menambahkan sebagai salah satu kerangka hegemoni, kekuatan ekonomi sangat memberikan peran yang signifikan, mempengaruhi hubungan di dunia dan menetapkan kelas kelas tertentu karena sesungguhnya, kehidupan manusia hampir selalu ditentukan dengan tingkat kemakmuran (Parkash, 2016).

Namun China memiliki pandangan yang lain tentang hubungan kekuatan ekonomi dan politik hegemoni. Dimulai pada Februari 1972, China telah melakukan perjanjian dengan aktor superpower saat itu, Amerika Serikat. Perjanjian yang diusung oleh kedua negara tersebut menjadi titik pertama perbincangan bilateral yang menyangkut permasalahan hegemoni. Di dalam Shanghai Communique yang disetujui kedua belah pihak tersebut diatur bahwa :

*“neither should seek hegemony in the Asia-Pacific region and each is opposed to effort by any other country or group of countries to establish such hegemony”* ( Peking Review 1972 dalam Glaubitz, 1976).

Kawasan Asia Pasifik yang dimaksudkan dalam Shanghai Communique ini tidak memiliki definisi atau garis batas yang jelas dalam perjanjian manapun saat itu. Namun merujuk pada definisi Asia Pasifik saat ini, merupakan suatu kawasan yang mencakup negara-negara berkekuatan besar baik dalam politik, ekonomi atau aspek lainnya seperti Amerika, China bahkan Rusia. Keberadaan perjanjian ini secara tidak langsung telah membuat kedua belah pihak memiliki dua kewajiban utama sekaligus yakni mengesampingkan keinginannya apabila hendak memperluas hegemoni ke kawasan tersebut dan memastikan bahwa kawasan potensial tersebut netral dari suatu bentuk hegemoni apapun.

Namun rupanya didalam perjanjian yang sama, perbedaan pola dan sudut pandang tetap terjadi pada kedua pihak yang meratifikasi. Bagi China berdasarkan perjanjian tersebut, semua negara harus berada dalam posisi atau kedudukan yang sama, dimana negara yang besar atau kuat tidak boleh mengganggu negara yang lebih kecil atau lemah, sehingga muncullah keputusan China untuk tidak akan menjadi negara superpower dan menolak kekuasaan hegemony. China juga mengaplikasikan makna dari perjanjian tersebut dengan mendukung semua bangsa dan orang yang tertindas dalam rangka meraih kebebasan. Bagi China, semua warga negara memiliki hak untuk memilih sistem sosial mereka sendiri dan melindungi kemerdekaan, kedaulatan dan integritas negaranya (Embassy of the People's Republic of China in the United States of America, 1972).

Sementara itu bagi Amerika, terdapat perbedaan yang cukup berbeda dan menonjol daripada pemahaman China. Amerika pada dasarnya bersikap mendukung kebebasan individu dan kemajuan sosial bagi semua bangsa di dunia untuk bebas dari tekanan dan intervensi asing, sama seperti China. Tetapi, diawali dari tidak adanya pernyataan yang menolak hegemoni, Amerika serasa serupa namun tak sama dengan pemahaman China. Amerika berpendapat bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, kedamaian Asia atau bahkan dunia memerlukan usaha antara China dan Amerika untuk mengurangi ketegangan secara langsung dan menghilangkan penyebab dasar konflik. Amerika pun mewujudkan pemahaman tersebut dengan menjadi pen jembatan untuk komunikasi antar negara yang memiliki ideologi berbeda sehingga mengurangi resiko konfrontasi (Office of the Historian, 1972). Penekanan Amerika terhadap urgensi keterlibatan pihak peratifikasi inilah yang menimbulkan perbedaan dengan pandangan China. Jika China memandang mendukung namun mengesampingkan adanya penggolongan kelas antar negara, Amerika sebaliknya, mendukung dengan menekankan urgensi kehadirannya dalam meraih perdamaian dunia.

Dimulai dari Shanghai Communique tersebut, pandangan China yang anti akan kekuatan hegemoni mulai menguat dan terwujud di dalam setiap kebijakan-kebijakan politiknya. Hegemoni bagi masyarakat China diartikan sebagai perluasan dari kekuatan baik secara politik ataupun ekonomi, serta pelaksanaan kontrol (Glaubitz, 1976), yang mana ditanggapi secara negatif pula dalam aplikasinya. China memiliki asumsi bahwa persaingan antar negara *superpower* untuk sebuah hegemoni akan menjadi awal dari perang dunia yang merugikan (Glaubitz, 1976).

Oleh karena itu China amat mendukung keberadaan perjanjian Shanghai Communique dan bahkan merealisasikan asumsinya pada kebijakan-kebijakan luar negerinya, tidak hanya dalam lingkup Asia, tapi juga internasional. Sikap anti hegemoni inipun ditunjukkan oleh badan keamanan negara, militer, dalam sebuah konferensi di Amerika :

*“China does not prepare to establish any force-projection capability overseas, does not join in any military alliance and does not seek spheres of influence ... China has no military bases overseas or any active-duty soldiers stationed abroad. China is not interested in being involved in an arms race with other powers and will never engage in military expansion. China has never sought hegemony in the past, does not at present and will not in the future” (Roy, 1997)*

Pernyataan tersebut semakin mempertegas bahwa China bersifat kontra akan adanya hegemoni dan memilih untuk bersifat netral dalam setiap konflik yang terjadi sehingga tidak berpihak pada siapapun yang sedang berusaha meraih hegemoni.

Perubahan pandangan terkait konsep hegemoni mulai merambah China pada era-era dimasa perekonomiannya tumbuh pesat, tepat bersamaan dengan munculnya kekhawatiran masyarakat dunia. Kekhawatiran masyarakat itu berawal dari negara adidaya Amerika Serikat. Pesatnya pertumbuhan China menimbulkan banyak julukan baru bagi negara tersebut yang menjadi *headline* bagi media-media barat, seperti *“China won”*, *“China, a rising power”*, dan *“China: The Awakening*

*Giant.*” Sudah 40 tahun memang pertumbuhan China menjadi perhatian dunia, terutama pihak barat (Feng, 2017). Perhatian atas kebangkitan China di bidang ekonomi, geopolitik dan militer telah mendorong banyak orang di Amerika terutama golongan neo konservatif dan liberal untuk mengembangkan “China threat theory” (Moak, 2017). Selain ketiga hal lain, terdapat hal mendasar yang menyebabkan kemunculan “China threat theory” di kawasan Amerika Serikat, yakni ideologi. Amerika yang menganut liberal demokrasi dan China dengan otoriternya merupakan alasan utama untuk persaingan dan rasa tidak percaya diantara keduanya (Friedberg, 2011). Kebangkitan China secara tidak langsung menjatuhkan Amerika sebagai negara yang sedang menggaungkan demokrasi di dunia internasional.

Pertumbuhan China yang terus-menerus didalam rezim otoriter dapat memperumit dan melambatkan usaha yang telah lama dibangun Amerika dalam mempromosikan persebaran institusi politik liberal ke seluruh dunia (Friedberg, 2011). Hal ini dikarenakan otoriter merupakan lawan dari paham liberal yang digaungkan oleh Amerika. Selama ini dalam mempromosikan paham liberal dan demokrasi, Amerika lekat mengkaitkannya dengan kesejahteraan ekonomi dan politik. Ekonomi negara akan bangkit dengan adanya sistem yang liberal dan pemerintahan negara akan lebih menjamin posisi rakyat jika menggunakan sistem demokrasi. Namun tanpa diduga, ditengah-tengah usaha Amerika dalam membangun tatanan dunia yang demokratis, China muncul sebagai antitesis bahwa hanya demokrasi yang menjamin kesejahteraan ekonomi. Kebangkitan China yang

begitu hebat di abad 21 ini telah menginspirasi rezim otoriter lainnya seperti Timur Tengah atau Afrika.

Ditengah-tengah persaingan dan permasalahan tersebut, bukanlah hal yang berlebihan untuk mengatakan bahwa China termasuk variabel penting dalam menentukan hubungan keamanan Asia Pasifik dimasa depan. China bukan hanya negara dengan potensi terbesar untuk memainkan posisi hegemony, tetapi juga negara yang dapat menentukan kesuksesan atau kegagalan rezim keamanan multilateral secara individu (Roy, 1997). Namun, walau kekuatan China yang dianggap potensial untuk meraih posisi hegemoni di kancah regional terus bertambah pesat, China tetap tidak mengubah pandangannya terhadap konsep hegemoni. Walau sistem pemerintahan sudah jauh berubah, China tetap menolak keberadaan kekuatan hegemoni. Sikap anti hegemoni China tetap disampaikan langsung oleh presiden Xi Jinping pada Kongres Nasional CCP ke 19 :

*“China will never seek hegemony or engage in expansion "no matter what stage of development it reaches.... China will never pursue development at the expense of others' interests and China's development does not pose a threat to any other country”* (Xinhua, 2017)

Penolakan China akan status hegemoni ini tidak lantas menghapuskan posisinya di ranah internasional. Kini China berperan aktif untuk melaksanakan peran yang telah diatur dalam Shanghai Communique untuk senantiasa membantu perjuangan negara-negara yang tengah meraih kebebasan dari intervensi-intervensi asing, termasuk Amerika Serikat.

## B. Counter-Hegemony China di Asia Pasifik

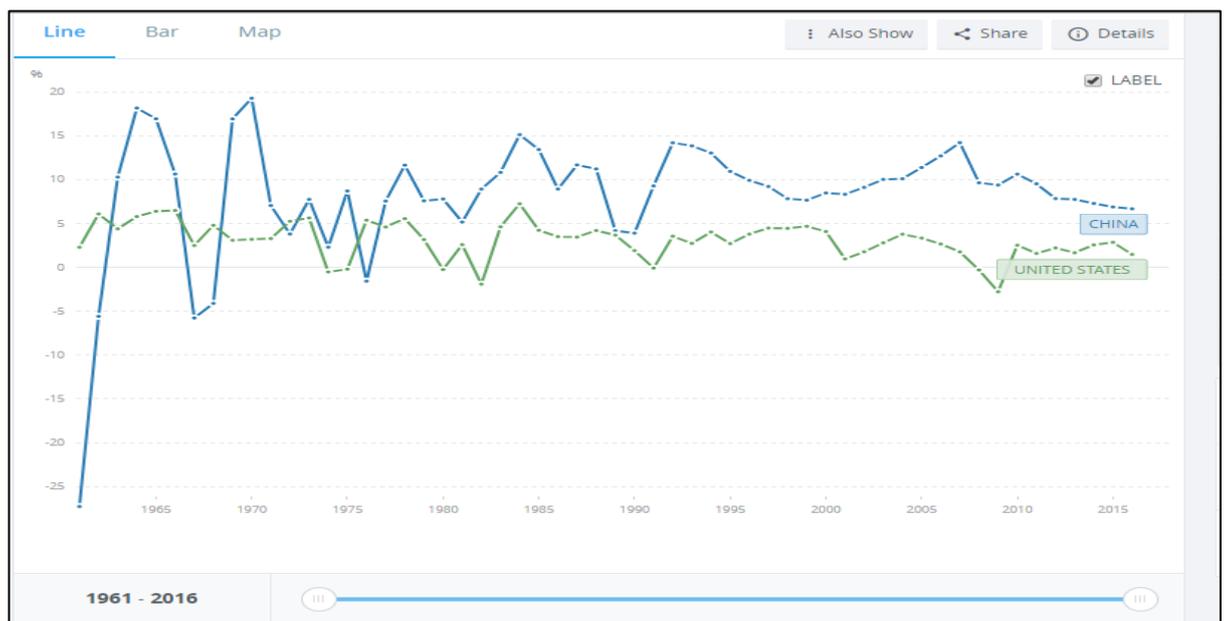
Tidak semua negara dapat dikatakan potensial untuk memiliki kekuatan hegemoni. Terdapat setidaknya empat aspek penting yang harus dipenuhi oleh negara untuk mendapatkan kekuatan hegemoni yaitu kontrol atas sumber daya mentah, modal, pasar dan keuntungan kompetitif dalam produksi barang yang bernilai tinggi (Keohane, 2005), atau lebih mudahnya disederhanakan menjadi *military-security*, *economic-production*, *financial-trade* dan *knowledge-technology* (Yazid, 2015).

Sejak akhir perang dunia kedua, Amerika telah mengambil peran sebagai negara adidaya di dunia internasional, runtuhnya Uni Soviet pasca perang dunia ketiga pun semakin menguatkan posisi hegemoni Amerika Serikat di segala bidang. Saat itu, Amerika menjadi satu-satunya negara yang memenuhi keempat aspek diatas dan menjadi penentu atas keberhasilan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi-institusi internasional. Namun hegemoni tersebut tidak berlangsung tanpa hambatan, kemunculan negara-negara yang termasuk dalam golongan counter-hegemony cenderung pesat seiring pertumbuhan ekonomi dunia. Negara yang termasuk dalam *counter-hegemony*, bukan semata negara yang menyatakan penolakan atas kekuatan hegemoni yang sedang berlangsung, tetapi juga negara yang dianggap memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi lawan dari negara hegemoni tersebut. Bukan lagi menjadi rahasia jika Uni Soviet menjadi *counter-hegemony* bagi Amerika Serikat, dimulai dari persaingan mereka pada era Perang Dingin, dengan kekuatan persenjataan dan ekonominya pun Soviet dipandang sebagai negara yang cukup kuat untuk menyaingi Amerika.

Kedudukan Soviet sebagai negara *counter-hegemony* Amerika tersebut sempat menurun pasca perpecahan yang dialami. Namun hal tersebut juga ditandai sebagai munculnya aktor baru sebagai negara *counter-hegemony* Amerika yakni China. China muncul sebagai kekuatan baru pada tahun 1963 dan memainkan peran khusus dalam kancah regional (Yazid, 2015).

### B.1 Kekuatan Hegemoni China

Berdasarkan kualifikasi yang sama untuk menentukan derajat hegemoni suatu negara, China memang kini menjadi salah satu negara yang mengalami pertumbuhan pesat terutama di bidang ekonomi. Tingkat ekonomi tersebut disederhanakan dalam perhitungan GDP sebagai alat ukur pendapatan nasional negara dan diperbandingkan dengan Amerika Serikat oleh World Bank dalam grafik berikut (World Bank, 2017) :



#### Grafik 4.1 Perbandingan GDP China dengan Superpower Amerika

Terlihat sebagaimana pada grafik di atas, kenaikan nilai GDP China terlihat mengungguli Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 1984 misalnya, China mendapat poin 15,1 sebagai tingkat pertumbuhan GDPnya, sementara Amerika hanya meraih poin 7,2. Di tahun 1992, 2007 dan juga 2010, nilai-nilai tinggi juga terus dilambungkan China jauh diatas Amerika Serikat untuk perbandingan GDP, belum sekalipun nilai tersebut mampu dihalau oleh kekuatan ekonomi Amerika.

Kekuatan ekonomi China memang meningkat pesat pasca reformasi ekonomi dideklarasikan Den Xiaoping di era tahun 1978. Reformasi ekonomi tersebut menjadi agenda utama pemerintahan Den Xiaoping, yang lebih dikenal dengan *Four Modernization*. Agenda modernisasi China tersebut sebelumnya telah diinisiasi oleh Zhou Enlai pada Desember 1964, namun tertunda karena adanya revolusi kebudayaan di tahun 1966-1976 (Chow, 2004). Pasca revolusi kebudayaan, China memang masih berada dalam kekacauan dimana perekonomian turun, perpolitikan carut marut dan banyak korban masih menderita trauma akibat tragedi tersebut. Oleh karena itu, diperlukannya langkah tegas untuk membangun China dan membawanya bangkit. Kebijakan itupun cenderung dilandaskan oleh pandangan liberalisme dengan bukti penelitian dari Fraser Institute Economic Freedom yang mengatakan bahwa “*economic freedom is about 50 times more effective than democracy in reducing violent conflict*” (Williams, 2008).

Diharapkan dengan adanya modernisasi di China yang mengangkat perekonomian, kekacauan dapat teratasi dengan baik.

Den Xiaoping dengan dukungan Zhou Enlai membawa kembali semangat modernisasi yang difokuskan kepada 4 hal yakni pertanian, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pertahanan (Twitchett, Rawski, & Others, 2018). Inisiasi modernisasi tersebut perlahan membawa perubahan yang berarti bagi masyarakat China. Pada tahun 1992, ratusan juta masyarakat China terbebas dari kemiskinan dan China menjadi secara singkat China menjadi lebih kuat, lebih kaya dan lebih modern (Vogel, 2011). Sejak modernisasi tersebut digaungkan pun, China menjadi salah satu negara yang termasuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi tercepat karena mampu menggandakan GDPnya setiap 8 tahun, dengan tingkat pertumbuhan GDP yang mencapai 9,5 % di tahun 2017 dan dideskripsikan Bank Dunia sebagai “ the fastest sustained expansion by a major economy in history” (Morrison, 2018).

Meningkatnya perekonomian China tersebut tidak dapat dilepaskan dari dua aspek mendasar kualifikasi atas hegemoni suatu negara yakni penguasaan bahan mentah dan pasar. China menyumbang kelangkaan tanahnya untuk dieksploitasi sebanyak 23% dari total jumlah dunia dan menyumbang lebih dari 90% produk material langka di pasar global (Wrenn, 2012). Material langka yang diproduksi dan dijualbelikan oleh China memang bukanlah sesuatu yang dinilai amat tinggi oleh masyarakat pada umumnya seperti minyak, gas atau batu mulia seperti berlian. Namun material-material yang terdapat di dalam tanah China merupakan bahan yang langka dan amat dibutuhkan untuk kemajuan teknologi dan produksi berbagai

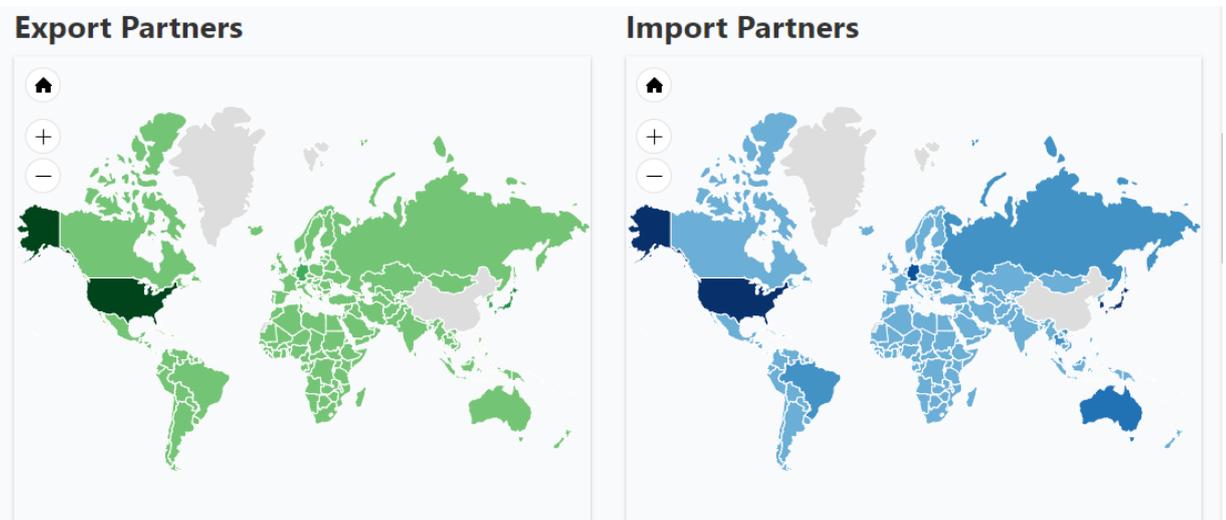
macam alat di era modern ini. Terdapat total 17 kelompok material langka di China yang penting untuk 25% teknologi modern termasuk telepon genggam, hardisk komputer dan mesin elektronik. Sebagai contoh bahan material tersebut antara lain, Scandium untuk komponen industri dirgantara, Yttrium untuk TV dan microwave, Promethium untuk baterai, Samarium dan Europium untuk laser, Thulium untuk mesin X-Ray dan masih banyak lagi. Tidak hanya dalam material untuk pembangunan teknologi, China juga menjadi salah satu negara terbesar yang memproduksi bahan baku di bidang farmasi dengan total pendapatan \$ 79,02 juta di tahun 2017, meningkat 2,7% dari 2016 (China Market Research Report, 2017). Banyaknya permintaan akan material langka di China ini membuat keuntungan terus meningkat dengan cepat, membantu menaikkan tingkat pendapatan nasional (GDP). Hal ini juga terbukti dengan meningkatnya pendapatan China pada tahun 2016 sebanyak 9,8 % atau sekitar 616,1 juta Yuan ( \$ 89,1 juta) (Reuters, 2016).

Pasar China pun tergolong unggul diantara negara lainnya, dimana tidak lagi mencakup kawasan Asia, tetapi sudah merambah ke berbagai penjuru dunia. Beberapa negara menjadikan China sebagai partner dagang terbesarnya, tak terkecuali Amerika Serikat. Amerika sebagai negara adidaya bahkan menjadi partner terbesar dalam hal perdagangan dengan China di tahun 2016, sebanyak 16 % produk China merupakan komoditas impor bagi Amerika (The Observatory of Economic Complexity, 2018). Produk-produk China memang cenderung digandrungi pasar internasional karena dapat dengan mudah didapatkan bahkan dengan daya beli yang berbeda-beda di tiap negara. Permintaan akan barang-barang China melejit tinggi hampir 2 kali lipat dari nilai impornya sehingga membuat

China menjadi negara dengan ekspor terbesar di dunia. Pada tahun 2016, nilai ekspor China mencapai \$2.06 triliun sementara nilai impor berada di bawahnya yakni \$1.32 triliun. Nilai tersebut menghasilkan neraca perdagangan yang positif atau dinilai untung sebesar \$736 milyar (The Observatory of Economic Complexity, 2018).

Meluas dan menguatnya pasar China tersebut diawali sama dengan proses modernisasi lainnya, *four modernization*, yang telah dicetuskan Den Xiaoping pada tahun 1978. Pasar menjadi salah satu fokus China saat itu untuk memperbaiki keadaan ekonomi, dan hal tersebut diwujudkan dalam “*open door policy*” pada bulan Desember 1978. Saat itu, rekan dagang China hanya berkuat pada Uni Soviet dan aliansinya. Deng sebagai pemimpin China saat itu merasa perlunya hubungan dengan barat baik dari segi teknologi maupun investasi untuk mendukung perekonomian China, oleh karena itu open door policy diciptakan dan membuat China membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pebisnis asing yang ingin melakukan investasinya di China (BBC, 2018).

Kebijakan tersebut mengantarkan China untuk bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada Desember 2001, yang secara tidak langsung memberi harapan akan semakin majunya tingkat reformasi China di bidang ekonomi dan finansial. Harapan China tersebut seakan terwujud dengan mudah pasca bergabung dengan WTO, dimana kini China menjadi negara yang kompetitif dalam hal ekspor-impor dan terlihat mendominasi pasar internasional. Pada tahun 2016 wilayah pasar China baik ekspor maupun impor sudah melingkupi mayoritas negara di dunia (GlobalEDGE, 2017) :



Gb. 4.1 Wilayah Impor dan Ekspor yang dikuasai China

Wilayah Amerika yang memiliki warna lebih tua menjadi negara terbesar yang menjalin kerjasama perdagangan dengan China. Tidak berhenti dengan Amerika saja, China juga dalam rangka realisasi kebijakan open door juga menjalin kerjasama perdagangan dengan dua organisasi regional besar terdekatnya yakni ASEAN DAN UE. Bersama ASEAN, China memulai hubungan dagang dengan memiliki perjanjian pasar bebas yang bernama ASEAN China Free Trade Area (ACFTA). Perjanjian dagang awal tersebut kemudian meluas menjadi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada Desember 2012. Pembentukan RCEP yang melibatkan ASEAN dan 16 negara anggota ASEAN FTA termasuk China ini bertujuan untuk memperluas dan memperdalam hubungan diantara pihak terkait dan menambah partisipasinya dalam pembangunan ekonomi (ASEAN, 2016). Berbeda dengan ASEAN, antara China dan UE tidak ada badan khusus yang menaungi hubungan perdagangan. Hanya pada tahun 2013, China dan UE membahas langsung sebuah perjanjian investasi untuk memfasilitasi investor di

kedua pihak dan memperpanjang akses jangka panjang untuk pasar di EU dan China (European Commission, 2017).

Kini, China tengah meraih status yang lebih kuat daripada dominasi di pasar dunia. Market Economy Status WTO yang menjadi perjanjian awal sejak menjadi anggota sedang menjadi fokus khusus bagi finansial China. Dibawah aturan WTO, China mendapatkan kesempatan 15 tahun untuk melakukan reformasi pasar yang sesuai dengan klasifikasi “market economy WTO”. Market Economy Status ini menjadi hal penting yang dapat diraih China karena menurut aturan WTO, jika suatu negara mendapatkan MES, harga ekspor dari negara tersebut akan berlaku mutlak bagi setiap negara yang melakukan kerjasama dengannya (Current Affairs, 2016). Disamping perjuangan China meraih status tersebut hingga saat ini, Presiden China, Xi Jinping pun mengatakan bahwa China akan senantiasa melakukan reformasi pasar dengan membersihkan peraturan dan praktik yang menghambat, mendukung pengembangan perusahaan swasta dan memastikan bahwa “open door policy” di China akan semakin terbuka lebar bagi siapapun yang ingin berperan (Reuters Staff, 2017).

Kekuatan ekonomi China pun membawa dampak positif pada aspek kenegaraan lainnya yakni militer dan pertahanan. Kini, angkatan bersenjata China tidak hanya bersiap untuk berperang di masa depan, tetapi juga untuk menciptakan deterrence yang memastikan kredibilitasnya untuk mengatasi konflik regional dan operasi militer di masa depan (Chansoria, 2011). Berbeda dengan jenis militer kuno dan kasar seperti China di masa lampau, modernisasi China dibidang militer kini dapat dikatakan berhasil. Pada tahun 2017, China menjadi negara ketiga yang

memiliki kekuatan militer terbesar meliputi air, udara dan darat (GFP, 2017) dan bahkan dalam rentang waktu satu tahun berikutnya menjadi negara yang dianggap sebagai kompetitor setara untuk menyaingi kekuatan militer Amerika Serikat (Marcus, 2018).

Keberhasilan tersebut tidak diraih secara instan oleh China. Berbekal kebijakan “four modernization” yang diinisiasi Deng Xiaoping, modernisasi China dibidang militer terbagi menjadi 2 fase . Fase pertama, dari masa Den Xiaoping hingga tahun 2010-an dikenal dengan periode “*catch-up*”, dimana China mempersiapkan diri untuk bergabung pada kontingen militer regional yang lebih luas seperti Taiwan dan Korea (Chansoria, 2011). Setelah militer China siap pada tahun 2010, fase kedua dimulai dengan tujuan tunggal yakni mendapatkan pengaruh kekuatan militer global. Fase kedua ini belum memiliki akhir yang pasti, walupun kini China telah menjadi salah satu negara yang kekuatan militernya diakui secara umum. China pun dalam usahannya meraih pengaruh militer global tersebut cenderung memilih aksi yang pasif. Hal ini dibuktikan dengan strategi militer China yakni “*active defense*” . Kebijakan militer “*active defense*” yang dijalankan China ini memiliki satu arti bahwa China tidak menginisiasi perang atau perang melawan agresi (Chansoria, 2011).

Strategi tersebut dilakukan bersamaan dengan perluasan pasar persenjataan China yang semakin menyempurnakan kekuatan China dibidang miiter. Berada dalam posisi urutan ketiga untuk negara eksportir terbesar persenjataan, China melampaui negara-negara berteknologi tinggi lainnya dan hampir meyetarakan diri dengan kedua kekuatan superpower era Perang Dingin, Amerika dan pecahan Uni

Soviet yakni Rusia (Raska, 2017). Pada awalnya, China merupakan negara yang termasuk banyak melakukan impor persenjataan dari berbagai negara termasuk Rusia, namun dalam beberapa dekade China berhasil membalik keadaannya dan menjadi salah satu eksportir persenjataan besar di dunia. Titik keberhasilan China untuk bersifat swasembada pada persenjataan ini terlihat pada tahun 2006, dimana China menjual senjata pada setidaknya 7 negara di kawasan Asia Tenggara melalui jalur perdagangan yang cukup terkenal yakni “*New Silk Road*” (Jennings, 2017). Berawal dari kawasan-kawasan terdekatnya, China memperluas pasarnya meliputi banyak negara di dunia dan mengalami peningkatan yang cukup drastis bahkan hingga mencapai 74 persen dalam kurun waktu 4 tahun di 2012 – 2016 (Raska, 2017).

Namun swasembada persenjataan itu tidak berlaku sepenuhnya karena China masih bergantung pada Rusia, Ukraina dan Prancis untuk beberapa komponen yang belum dapat diproduksi sendiri seperti mesin pesawat, helikopter, kapal dan lain sebagainya (Jiangtao, 2013). Hal tersebut tidak menjadikan penghalang yang berarti bagi berkembangnya pasar persenjataan China. Beberapa negara tetap menjadikan China sebagai eksportir utama untuk persenjataanya, terutama negara-negara dunia ketiga yang cenderung memiliki daya beli rendah. Biaya produksi yang dapat ditekan China lagi-lagi menghasilkan produk persenjataan yang berkualitas namun memiliki harga yang relatif murah, tak jarang permintaan akan produk tersebut meningkat setiap tahunnya. Kawasan Asia Tenggara merupakan konsumen terbesar bagi persenjataan China, hingga muncul istilah bahwa keberadaan China adalah senjata yang besar bagi kawasan tersebut.

Konsumen terbesar persenjataan China, Myanmar, pun turut serta menyumbang permintaan Asia Tenggara akan persenjataan China (Huang, 2017).

## B.2 Hegemoni China di Myanmar

Kekuatan China yang meningkat secara massive tersebut secara tidak langsung memenuhi kualifikasi negara yang dinilai memiliki kekuatan hegemoni. Namun masih pada pandangannya terhadap kekuatan hegemoni, China tidak menanggapi lebih lanjut dan berfokus pada pertumbuhan di negaranya. Pertumbuhan dan modernisasi China yang cepat ini menjadi perhatian seluruh warga dunia karena membuatnya berada dalam posisi 3 besar di aspek-aspek kekuatan negara dapat diartikan sebagai sebuah ancaman bagi hierarki kenegaraan yang selama ini terbentuk. Namun, hal ini dipandang berbeda oleh negara-negara dunia ketiga yang berada di sekitarnya seperti India, Vietnam, Myanmar dsb. Bagi negara-negara tersebut, kebangkitan China membawakan manfaat positif yang begitu besar baik bantuan ekonomi, kesempatan luas untuk bergabung dalam pasar China, atau munculnya kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan. Hal ini pun dialami oleh Myanmar, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan China. Sebagaimana disampaikan pada bab-bab sebelumnya, Myanmar dan China memiliki hubungan erat bahkan sebelum kekuatan hegemoni China mulai terlihat di abad 21 ini. Selain mendapat bantuan hubungan historis, merupakan hal yang tergolong mudah bagi China untuk mengimplementasikan politik hegemoninya di Myanmar yang tengah mengalami konflik dan membutuhkan banyak bantuan.

China memulai politik hegemoninya di Myanmar melalui aspek ekonomi, dimana China memberikan banyak bantuan ekonomi dengan menjadi mitra dagangnya ataupun mendirikan banyak proyek yang bernilai di kawasan Myanmar seperti pembangunan bendungan, investasi pada infrastruktur dan lain sebagainya. Hal ini menciptakan ketergantungan ekonomi diantara keduanya bahkan hingga tahun 2017. Salah satu aspek yang membuat Myanmar bergantung pada China untuk kemajuan ekonominya adalah bidang agrikultur. Bidang agrikultur Myanmar telah berusaha untuk menembus pasar yang lebih besar seperti Eropa dan Amerika, namun hingga bulan Juni 2017, pasar utama Myanmar tetaplah China (Thant, 2017).

Kuatnya pengaruh hegemoni China inipun terlihat dari isu-isu politik yang dihadapi Myanmar, dimana China berperan aktif atau tak jarang menjadi aktor kunci untuk penyelesaian isu tersebut. Hal ini terlihat pada tahun 2013 dimana China memberikan peran maksimal pada penyelesaian konflik etnis bersenjata, Kachin Independence Army (KIA). Penyelesaian yang dimaksudkan adalah adanya inisiasi untuk perjanjian damai antara kedua belah pihak yakni Myanmar dan KIA. China dalam usaha inisiasi tersebut berusaha menjadi jembatan antara kedua belah pihak, dimana ia tidak hanya memfasilitasi negosiasi antara keduanya di Ruili, China, tetapi juga menjamin keamanan semua partisipan selama proses perdamaian tersebut (Sun, 2013).

China memang bukanlah satu-satunya aktor yang berusaha mengambil peran dalam konflik etnis Kachin di Myanmar tersebut. Namun, pada akhirnya, China lah yang berperan banyak, walaupun belum ada perjanjian damai yang

dihasilkan kedua belah pihak, negosiasi damai diantara keduanya berhasil dilakukan dan sedikit menekan perlawanan KIA yang dikenal sebagai pelaku “perang sipil terlama” di Myanmar. Keberadaan China di Myanmar yang menjadikan dirinya sebagai jembatan utama antara pemerintah Myanmar dan KIA ini memang berlawanan dengan prinsip non-intervensi yang dimiliki ASEAN. Tetapi kebergantungan Myanmar terhadap China, menurut menteri luar negeri Myanmar, membuat keberadaan China sangat dibutuhkan baik oleh kelompok etnis bersenjata, maupun Naypyidaw atau pemerintah Myanmar NLD (Sun, 2013).

Ketergantungan Myanmar akan eksistensi China pun tidak berhenti seiring menguatnya demokrasi dan keterbukaan di Myanmar. Walau Myanmar telah membuka diri pada dunia dibidang ekonomi dan politik ditahun 2011, bahkan hingga mendapat julukan sebagai “*Asia’s Final Frontier*” (Parker, 2016), ia tetap membutuhkan peran China sebagai solusi untuk segala permasalahan yang dihadapi. Myanmar pun tidak merasa enggan akan ketergantungannya tersebut karena sejak masa Pauk-Phaw, hubungan antar dua negara tersebut terlihat seperti negara yang bersaudara, terlebih dalam beberapa aspek, Myanmar juga senantiasa mendukung China dan semua proyeknya. Ketergantungan akan China ini juga didasari oleh sikap China yang selalu berpihak pada Myanmar, yang terlihat di tahun 2017 pasca Myanmar mengalami tekanan internasional kedua kalinya untuk permasalahan HAM.

Pada tahun 2017, Myanmar lekat dengan isu etnis Rohingnya yang berada di kawasan Rakhine. Rohingnya merupakan etnis muslim yang berada di kawasan Myanmar yang notabenenya mayoritas beragama Budha. Peristiwa

menggemparkan dimulai ketika 650.000 masyarakat Rohingnya pergi meninggalkan Myanmar (Albert, 2018), banyak dari mereka menuju negara di sekitarnya seperti Bangladesh, Indonesia, bahkan hingga Australia. Ratusan ribu pengungsi tersebut, karena keadaan mendesak menempuh cara apapun agar dapat keluar dari Myanmar, hingga tak jarang banyak yang tak berhasil melarikan diri dan meninggal di laut karena permasalahan-permasalahan tertentu. Begitu mirisnya kehidupan masyarakat Rohingnya yang mendadak melakukan persebaran pengungsi ini memancing dunia internasional untuk menyelidiki apa yang sebenarnya tengah terjadi di Myanmar.

PBB turun langsung untuk ke Myanmar dan menyatakan secara resmi pada akhir tahun 2017 bahwa di kawasan Rakhine, etnis Rohingnya tengah mengalami konflik berdarah dengan etnis Budha, atau disederhanakan sebagai pembersihan etnis (Westcott & Koran, 2017). Bentrokan dengan masyarakat Budha Myanmar membuat etnis Rohingnya kehilangan tempat tinggal, mata pencaharian bahkan nyawa mereka sendiri. Banyak dari masyarakat Rohingnya dibunuh baik anak-anak maupun lelaki, dan perempuannya harus mengalami pemerkosaan sebelum dibunuh. Tindakan ini tentu memicu reaksi keras dari masyarakat internasional untuk melindungi etnis Rohingnya. Myanmar kemudian memberikan pernyataan bahwanya etnis Rohingnya bukan merupakan etnis yang diakui oleh undang-undang nasional, tetapi Myanmar akan terus berusaha untuk meredam konflik tersebut.

Namun, pernyataan dari Myanmar tersebut tidak melunakkan reaksi dari dunia internasional yang dipelopori PBB. PBB terus menggalang suara untuk

memvalidkan tuduhan pembersihan etnis bagi Myanmar, bersama negara-negara besar seperti Eropa yang diwakili Uni Eropa dan Amerika. Myanmar pun lagi-lagi mendapatkan bantuan dari negara yang selama ini memihaknya, China. China menjadi satu-satunya negara yang memveto keputusan PBB untuk memberikan tuduhan pembersihan etnis terhadap Myanmar tersebut (Fish, 2017). Hak Veto memang dimiliki China sebagai anggota tetap dewan keamanan PBB, dan secara bersamaan membuatnya menjadi salah satu negara terpandang di organisasi internasional tersebut. China melalui menteri luar negerinya menyatakan keberpihakkannya terhadap Myanmar dengan mengatakan pada media jika :

*“China support Burma’s efforts to “ uphold peace and stability”, Burma is a friendly and close neighbor of China and Chinese side sincerely hopes that the Rakhine state can restore stability as soon as possible and the local people can live a normal life again”* (Fish, 2017)

Dari pernyataan tersebut, posisi China terhadap Myanmar sudah jelas ditentukan bahwa China akan senantiasa mendukung kebijakan Myanmar bahkan disaat-saat terendahnya. Berbeda dengan negara lainnya yang memilih pemberian tekanan dan sanksi terhadap Myanmar, China memilih untuk membantu dan lagi-lagi menjadi solusi bagi konflik yang sedang dialami Myanmar. Selain bantuan dalam bentuk veto tersebut, China pun langsung mendirikan kantor perwakilan di ibu kota Myanmar untuk membantu Myanmar secara langsung menangani krisis Rohingnya tersebut. Langkah tersebut dianggap ekstrim oleh negara lain, karena disaat mayoritas negara enggan turun langsung ke Myanmar karena isolasi dan hubungan dengan junta militer sebelumnya, China tanpa ragu mendirikan kantor

perwakilan hanya untuk menyelesaikan satu permasalahan (Fish, 2017). Myanmar pun merasa bahagia karena memiliki negara sebesar China yang mendukungnya disaat negara lain sibuk memikirkan sanksi dan memberi tuduhan atas pelanggaran HAM berat di Rakhine. Hal inipun yang mendukung Myanmar terbuka dan mengizinkan China untuk memberikan bantuan-bantuannya termasuk mendirikan kantor perwakilan di ibukota.

Selain itu, besarnya hegemoni China di Myanmar dapat disederhanakan menjadi beberapa aspek penting dan krusial seperti dalam tabel dibawah ini : (dari berbagai sumber)

<b>Aspek</b>	<b>Kontribusi China</b>	<b>Perbandingan</b>
<b>Ekspor – Impor (2016) Myanmar ekspor \$11,7 B, impor \$ 15,7 B</b>	Ekspor ke China \$ 4,77 B Impor dari China \$ 8,19 B Hampir 50 % dari total	Posisi kedua ekspor, Thailand dengan \$ 2,24 B Posisi kedua impor, Singapura dengan \$ 2,28 B
<b>Investasi</b>	China investasi \$18 B dalam 183 proyek di Myanmar. Mencakup 30% dari total investasi masuk	Posisi kedua diraih Singapura dengan total investasi \$ 16 B
<b>Keamanan dari tahun 1990 - 2016</b>	Aircraft 120 Armoured Vehicle 696 Missiles 1029 Naval Vessels 21 Artillery 125	Jumlah total, persentase Aircraft : 264 unit, 45% Armoured : 886 unit, 78% Missiles : 4222 unit, 24% Naval : 27 unit, 77% Artillery : 392 unit, 31 %
<b>Pendanaan atau Pinjaman Negeri Luar</b>	China meminjamkan \$ 3,96 B Berkisar 44 % dari jumlah total pinjaman	Sebanyak \$ 3,3 B lainnya merupakan akumulasi pinjaman dari negara-negara Paris Club

Tabel 4.1 Aspek-aspek Hegemoni China terhadap Myanmar

Aspek-aspek tersebut menjadi contoh penting bahwasanya dalam setiap aspek kehidupan bernegara, Myanmar senantiasa menjadikan China sebagai pilihan

utama. Baik dalam mitra dagang hingga hutang-piutang. Terlihat jelas bagaimana China menjalankan perannya sebagai pemilik politik hegemoni di Myanmar. Myanmar pun merespon hegemoni China tersebut dengan terus bergantung akan eksistensinya. Myanmar dan China kembali mengulang masa-masa emas Pauk-Phaw bahkan hingga saat ini. Walaupun Myanmar terus mengalami berbagai konflik etnis tiada henti, peran China untuk intervensi permasalahan tersebut tidaklah berhenti. China terus menjadi titik terang bagi permasalahan Myanmar bahkan perjanjian damai yang kini tengah dirancang oleh Myanmar.

Walaupun kebangkitan China seringkali dimaknai negatif oleh mayoritas negara di dunia, China memiliki manfaat tersendiri bagi negara-negara yang berada dalam hegemoninya seperti Myanmar. China memiliki strategi tersendiri dalam merepon pandangan dan kekhawatiran masyarakat tersebut. China "*Peaceful Rise*" menjadi titik terang bagi China untuk menghentikan kekhawatiran masyarakat atas kebangkitan China.

#### C. China's "*Peaceful Rise*" sebagai landasan kebijakan China di Myanmar

Upaya modernisasi yang telah diinisiasi China pada tahun 1978 kini mulai menunjukkan pencapaian terbaiknya sejak awal abad ke 21. Dominasi China di aspek-aspek kekuatan kenegaraan mulai menjadi perhatian publik dan negara-negara besar di atasnya. Memiliki aspek kejutan tersendiri, China bangkit begitu cepat melewati krisis-krisis yang terjadi beruntun dinegaranya. Terlebih, terdapat

banyak halangan mulai dari politik hingga ekonomi yang membuatnya mustahil untuk bangkit hanya dalam kurun waktu tertentu.

### C.1 Kemunculan China's "*peaceful rise*"

Istilah kebangkitan China diawali dengan keberadaan imperialisme Inggris di kawasan Asia, China yang saat itu berjaya dan potensial untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi besar di dunia mengalami keadaan yang kacau balau. Pada awal tahun 1800-an China memang menjadi negara yang mendominasi perekonomian dunia ditambah adanya bantuan dari jalur perdagangan "Silk Road" yang mempermudah distribusi barang dari dan keluar China. Produk-produk China di masa itu memiliki inovasi yang melampaui teknologi barat, menciptakan permintaan secara massive berdatangan mulai dari tekstil, hingga barang-barang sederhana seperti kertas, baja, hasil pertanian dan lain sebagainya. Kekuatan ekonomi China tersebut tidak berlangsung lama karena munculnya hambatan yang disebabkan oleh imperialisme Inggris. Di era tahun yang sama, Inggris sebagai salah satu kekuatan dunia terus memperluas wilayah imperiumnya hingga ke wilayah Asia. Hal ini menjadi hambatan tersendiri bagi China karena selain Inggris merupakan pesaing di bidang perdagangan, ia juga memiliki kekuasaan wilayah yang berbatasan langsung dengan China, yakni India. Inggris melalui berbagai kebijakan imperiumnya di India berusaha mempengaruhi perkembangan ekonomi China yang perlahan namun pasti menggulirkan China dari hierarki negara ekonomi besar di dunia.

Salah satu kebijakan paling populer dalam hubungan China dan Inggris saat itu adalah penyelundupan narkotika dari pedagang Inggris melalui India menuju ke China. Pada Maret 1839 sebanyak 2000 peti opium (bahan dasar narkotika) dengan berat total 1.400 ton ditemukan oleh pemerintah China dari pedagang Inggris (Pletcher, 2017). Hal ini tentu memicu amarah bagi pemerintah China karena selain bertentangan dengan peraturan *free-opium* yang berlaku, keberadaan narkotika telah menciptakan candu yang merusak kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat China kala itu. Keadaan tersebutpun kian memburuk karena kondisi China yang dianggap tidak kooperatif dalam perdagangan sehingga bersifat *non-reciprocal* dan merugikan Inggris. Rumitnya hubungan antar kedua negara tersebut berakhir dengan perang selama hampir 4 tahun yang dikenal dengan nama *Opium War*. Perang tersebut cukup merugikan bagi kedua belah pihak karena banyaknya korban yang berjatuhan ditambah rusaknya sarana-prasarana, namun perlahan situasi berbalik dan menunjukkan bahwa China berada di ambang kekalahan dan kerugian yang besar. Kekalahan China terjadi tepat pada Agustus 1842, dimana menghasilkan suatu perjanjian yang jauh dari kata adil yakni “Treaty of Nanjing”. Perjanjian Nanjing, mengharuskan China untuk membayar ganti rugi kepada Inggris, menyerahkan kekuasaan Hongkong dan menyetujui kebijakan tarif yang “adil dan beralasan” untuk setiap perdagangannya (Britannica, 2015).

Kehidupan China pasca itu dipenuhi perang dan kemerosotan. *Opium Wars* kedua berjalan tidak lama pasca perjanjian Nanjing dibuat dan menghadirkan aktor baru yakni Perancis. Memasuki awal abad ke 20, dibarengi dengan imperialisme Jepang, China mulai membangun kembali kekuatannya yang ditandai dengan

pembentukan 2 partai politik besar yakni *The Nationalist Party* and the *Chinese Communist Party*. Pendirian partai pada tahun 1921 tersebut didasarkan pada keinginan yang kuat untuk menyatukan China kembali secara politik (Asia For Educator, 2018). Keinginan tersebut terwujud, ditandai dengan banyaknya pembaharuan atau reformasi disegala bidang yang dilakukan China pada abad ke 20 tersebut. Reformasi pertama dilakukan dibidang agrikultur pada tahun 1950 yang disusul oleh modernisasi secara menyeluruh di tahun 1978 dan mengantarkan China pada dominasi ekonomi di abad 21 saat ini.

Istilah China's "Peaceful Rise" merupakan hal yang lekat jika membahas mengenai dominasi ekonomi China di abad 21. Istilah tersebut sebenarnya sudah muncul di tahun 1990, namun masih berupa pandangan kasar dari masyarakat dunia tentang pesatnya pertumbuhan China terutama di ranah ekonomi. Kemudian istilah tersebut menguat melalui kebijakan "*China's long-term national goal 2020*", yang disampaikan pada konvensi ke 16 CCP dan kongres rakyat nasional ke 11 (Yi, 2005). Tujuan yang disampaikan pemerintah China saat itu adalah mengubah masyarakat China saat ini menjadi masyarakat yang "hexie" , dimana populasi secara umum dapat menikmati hidup yang lebih harmoni dan berlimpah (Yi, 2005). Tujuan nasional ini kemudian digunakan sebagai pijakan untuk terus menjaga pertumbuhan baik ekonomi maupun politik menuju yang lebih tinggi sehingga muncul gagasan kebangkitan China yang dibentuk secara nyata sebagai suatu penelitian untuk masa depan.

Gagasan kebangkitan China ini merebak di tahun babak akhir abad ke 21, ketika pertumbuhan ekonomi China semakin cepat dan posisinya di perekonomian

dunia terus naik (Yue, 2008). Namun, seakan mengulang masa lampau dimana pertumbuhan China dianggap sebagai penghalang, gagasan tersebut untuk kesekian kalinya harus menerima respon negatif dari pihak-pihak barat seperti Amerika, Jepang dan pesaing lainnya. Gagasan mengenai kebangkitan China ini kemudian berubah bentuk menjadi suatu penelitian khusus, berkat inisiasi oleh Zheng Bijian saat melakukan kunjungan ke PBB bersama dengan perwakilan dari Chinese Communist Party (CCP) di tahun 2002 (Glaser & Medeiros, 2007).

Kunjungan Zheng ke PBB tersebut merupakan pertemuan yang didesain langsung oleh Amerika untuk bertukar pandang mengenai kebangkitan China di ranah global. Zheng merasakan adanya keraguan dari Amerika dan negara-negara lainnya mengenai kebangkitan China, baik itu dari sisi keberlanjutannya ataupun kesuksesannya. Namun Zheng saat itu juga merasa bahwa ada sedikit harapan yang diberikan pada China untuk turut berperan di ranah global sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan besar. Oleh sebab itu, saat kembali ke China, Zheng langsung membentuk suatu penelitian khusus yang membahas langkah-langkah China agar dapat memastikan diri sebagai negara yang memiliki kekuatan besar di dunia. Inti penelitian Zheng saat itu adalah menganalisa hubungan antara pembangunan sosialisme berkarakter China dan integrasinya terhadap kawasan serta dunia secara global (Glaser & Medeiros, 2007). Ditengah-tengah kemunculan berbagai alasan seperti ideologi dan geopolitik yang mendasari "*China Threat Theory*" tidak menghentikan pertumbuhan China yang kian pesat terutama di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi China memang tidak sehebat masa-masa

awal modernisasi, namun kini kondisinya sudah cenderung stabil berada di atas rata-rata, melampaui negara-negara besar lainnya.

Pada tahun 2003, gagasan kebangkitan China diwujudkan sebuah kebijakan baru dikeluarkan oleh China dan terkesan mengandung ambiguitas politik. Kebijakan tersebut mengandung unsur hegemoni, namun pemerintah China tetap dengan tegas menyatakan anti hegemoni. China's "*Peaceful Rise*" merupakan kebijakan yang ditujukan sebagai *counter* atas ketakutan internasional terkait kebangkitan China (Pan, 2006). Secara singkat, kebijakan ini menjelaskan bahwasanya kebangkitan China bukanlah kebangkitan yang dapat mengancam keberlangsungan atau kepentingan suatu negara, justru ia dapat menjadi kunci untuk menjamin kondisi yang damai dalam rangka menuju pertumbuhan di segala bidangnya. Kebijakan ini menyatakan bahwa China akan membangun perekonomian dengan memanfaatkan keuntungan lingkungan internasional yang damai, dan disaat bersamaan akan menjaga dan berkontribusi untuk kedamaian dunia dengan hasil pembangunannya (Pan, 2006). Terdapat 5 poin penting yang tercantum dalam kebijakan ini yakni : (Guoguang, 2006)

- China akan melibatkan keuntungan dari kedamaian dunia untuk memajukan pembangunannya, dan sebagai gantinya, akan menjaga kedamaian dunia dengan pembangunannya
- China akan bergantung pada kekuatannya sendiri untuk memperjuangkan kebangkitannya yang damai
- China akan tergabung secara aktif dan berkelanjutan dalam aktivitas ekonomi dan globalisasi melalui kebijakan "opening-up"

- Tahapan-tahapan yang akan dilalui China akan melibatkan beberapa generasi
- Kebangkitan China tidak akan menghalangi negara lain atau menimbulkan ancaman terhadap negara lain atau mengorbankan negara-negara tertentu.

Namun, istilah dan kebijakan mengenai kebangkitan China ini mulai berubah di era abad 21. Pada September 2011, pemerintah China mengeluarkan sebuah dokumen resmi berjudul “*China’s Peaceful Development*” (Loh, 2011). *China’s peaceful development* ini diharapkan dapat lebih memperjelas dan memfokuskan China untuk berproses dalam pembangunan negara. Berbeda dengan *China’s peaceful rise* yang cenderung abstrak untuk sekedar menggambarkan kebangkitan China dari masalah yang kelam dan keterpurukan, *China’s peaceful development* merupakan tujuan utama pemerintah saat ini untuk lebih berfokus pada pembangunan ekonomi. *Peaceful development* memiliki dua pokok tujuan yakni “good neighbourliness” dan “global responsibility”. Seringkali kebijakan ini diinterpretasikan sebagai perubahan yang sedang dilakukan China untuk berperilaku seperti negara “*great power*” (Yi, 2005). Hal ini tentu merupakan suatu pembaharuan besar karena setelah beberapa dekade sebelumnya, China tergolong sebagai negara yang apatis dimana ia selalu melakukan tindakan-tindakan seperti *the hundred flowers campaign* atau *cultural revolution*<sup>1</sup> yang tidak pernah dipikirkan pengaruh atau interpretasinya bagi masyarakat global dan regional.

---

<sup>1</sup> The Hundred Flowers Campaign merupakan kebijakan yang dibuat pada masa Mao Zedong dimana pada awalnya semua masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan kritik terhadap pemerintah, namun pasca itu mereka yang dianggap menentang pemerintah dibasmi. Cultural Revolution merupakan kebijakan di era yang sama dimana masyarakat yang tidak bersepemahaman sama dengan komunisme ala Mao Zedong dibasmi, dengan tujuan menyempurnakan atau mengembalikan ajaran komunis China sesuai dengan pemahaman Mao Zedong

Kebijakan *peaceful development* ini dimulai dari ranah regional dimana China memfokuskan diri di kawasan Asia Pasifik dengan memperkuat diplomasi bilateral, mengembangkan kemitraan kerjasama yang konstruktif dan berpartisipasi dalam organisasi multilateral regional (Yi, 2005).

China memang memiliki cara yang cukup efisien dan menarik dalam merealisasikan kepentingan nasionalnya. Antara kebijakan *peaceful rise* dan *peaceful development* memiliki hal menarik yang sama yakni terciptanya stabilitas kedamaian global. Bahwa China menekankan jika ia akan berusaha untuk menciptakan situasi damai baik itu di kancah regional maupun internasional karena keadaan damai tersebut dapat mendukung perkembangan China untuk menuju negara superpower dimasa depan dan merealisasikan tujuan nasionalnya di tahun 2020. Kebijakan ini tergolong kebijakan yang berkelanjutan, bahkan walau pemerintahan di China mengalami pergantian. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan resmi dari presiden China saat ini, Xi Jinping, dalam sebuah konferensi di Amerika bahwa “*China should guide international security towards a more just and rational new world order*” (The Economist, 2017).

## C.2 Pengaruh kebijakan China terhadap stabilitas di Myanmar

Kebijakan China untuk senantiasa mendukung terciptanya perdamaian atau stabilitas global tersebut lantas menjadi alasan utama akan keterlibatan China diberbagai konflik yang ada, salah satunya adalah Myanmar. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan China, maka Myanmar termasuk dalam regional yang harus dijaga kedamaiannya berdasarkan kebijakan “*regional first*” China.

Terciptanya kedamaian Myanmar merupakan langkah pertama China untuk menciptakan kondisi internasional yang senantiasa damai dan mendukung perkembangan ekonominya. Oleh karena itu, China melaksanakan perannya sebagai penjaga kedamaian dunia dengan melakukan banyak kebijakan untuk membantu pemerintah Myanmar menangani krisis di negaranya. Berbagai kebijakan dan sikap politik telah China lakukan sebagaimana disampaikan pada bab sebelumnya. China menggunakan segala cara, baik itu melalui kekuatan ekonomi maupun politiknya.

Kuatnya hegemoni China untuk menciptakan perdamaian di Myanmar hingga saat ini, di akhir tahun 2017 memang belum menunjukkan hasil yang signifikan berupa perjanjian damai atau gencatan senjata. Memang bukan hal yang mudah untuk menyatukan beragam etnis didalam satu payung perjanjian atau kesepakatan yang sama mengingat setiap pihak pasti memiliki kepentingan yang berbeda. Walaupun China telah memberikan pendekatan yang intim pada salah satu etnis yang diniali menjadi pemimpin atau inisiator bagi etnis-etnis kecil lainnya, UWSA, kesepakatan damai seutuhnya belum dapat dimiliki oleh Myanmar. Namun menilik kembali pada usaha yang kini tengah Myanmar bangun yakni “21st Panglong Peace Conference”, intervensi China dengan menjadi jembatan kedua belah pihak yakni etnis utama, UWSA dan Myanmar tidak bersifat nihil hasil. Pencapaian-pencapaian positif yang dapat diartikan sebagai satu langkah menuju kedamaian telah terlihat di setiap negosiasinya.

Perjanjian damai Myanmar dimulai dengan National Ceasefire Agreement (NCA) pada bulan Maret 2015. Perjanjian ini belum dapat terealisasi karena dari

15 etnis yang diundang, hanya 8 etnis yang mau menandatangani keseluruhan draft tersebut yakni The All Burma Students' Democratic Front (ABSDF), Arakan Liberation Party, Chin National Front, Democratic Karen Benevolent Army, Karen National Liberation Army-Peace Council, Karen National Union, Pa-O National Liberation Organization dan Shan State Army-South (Lat, Toe, Kyaw, & Mar, 2015). Etnis-etnis yang memegang peran dan posisi penting di Myanmar seperti UWSA dan Kachin menolak menandatangani perjanjian tersebut dan memilih untuk mendirikan suatu blok bernama Federal Political Negotiation and Consultative Committee (FPNCC). Keberadaan blok tersebut selain untuk merangkul etnis-etnis minoritas yang memiliki pandangan yang sama, juga untuk memudahkan pemerintah Myanmar apabila hendak melakukan negosiasi tingkat lanjut.

Dalam proses negosiasi damai selanjutnya, "*21st century panglong conference*", Myanmar cenderung mengabaikan keberadaan blok oposisi tersebut dan memfokuskan diri pada etnis-etnis yang telah menandatangani NCA sebelumnya. Etnis yang menandatangani NCA tersebut memang telah mendapatkan undangan resmi dari pemerintah Myanmar untuk berpartisipasi kembali secara aktif pada proses negosiasi selanjutnya, konferensi Panglong, bahkan tidak hanya itu, etnis-etnis tersebut mendapatkan kesempatan untuk berdialog dengan pemerintah Myanmar secara langsung untuk membahas hal-hal diluar konferensi (Kumbun, 2017). Selisih waktu yang cukup lama antara NCA dan konferensi Panglong tersebut memunculkan tekanan internasional dari Amerika Serikat. Amerika menilai Myanmar terlalu lama menciptakan keadaan damai, dan korban jiwa akibat

konflik etnis masih berjatuh. Sebanyak 100.000 orang menjadi korban atas konflik militer dan etnis di kawasan Kachin dan Shan yang membuat Amerika terus menekan Myanmar untuk segera mengikat seluruh etnis dalam satu perjanjian yang mencakup kesamaan aspirasi. Tekanan tersebut pun memicu China untuk mengambil tindakan atas Myanmar. China melalui menteri luar negerinya kemudian merespon bahwa China menyambut dan mendukung semua tahapan politik yang tengah dilalui Myanmar (Slodkowski, 2015).

Pada 2016, tahap awal negosiasi damai konferensi Panglong dimulai. Konferensi ini menghadirkan seluruh etnis-etnis kunci yang selama ini menjadi oposisi pemerintah Myanmar, termasuk UWSA. Namun selama 4 hari konferensi dibulan September ini tidak menghasilkan resolusi apapun. Beberapa etnis yang sedang berkonflik militer tentu tidak datang, dan aktor minoritas terbesar UWSA meninggalkan konferensi dihari kedua tanpa alasan yang jelas (AFP, 2016). Kurang berhasilnya konferensi Panglong yang pertama tersebut tidak menyurutkan semangat Myanmar yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Hingga pada bulan Mei 2016, konferensi Panglong kedua diadakan kembali dengan dukungan penuh China.

Konferensi kedua Panglong ini sempat menimbulkan permasalahan karena Aung San Suu Kyi menyatakan bahwa NCA merupakan titik draft pertama yang akan menjadi pembahasan dalam konferensi tersebut. Hal ini jelas secara tidak langsung menyingkirkan etnis-etnis yang menolak menandatangani NCA seperti etnis kunci UWSA dan Kachin. Keputusan Myanmar tersebut kemudian dinegosiasikan ulang oleh China sehingga etnis-etnis yang menolak NCA dapat tetap hadir di konferensi dan berdialog langsung dengan pemerintah Myanmar.

Terdapat 2 blok oposisi yang hadir pada pertemuan kedua konferensi Panglong tersebut, FPNCC yang dipimpin oleh UWSA dan UNFC yang berada di kawasan tenggara Myanmar. Di dalam konferensi tersebut, FPNCC masih menekan pemerintah Myanmar untuk mencari alternatif lain terkait NCA dan UNFC masih bernegosiasi tentang syarat-syarat untuk penandatanganan NCA (Nyein, 2017)

Kehadiran hampir seluruh etnis di Myanmar tersebut dinilai merupakan satu langkah positif untuk terciptanya stabilitas di Myanmar. Sebagai hasil dari konferensi tahap 2, terdapat 37 dasar yang telah diadopsi dari keseluruhan 41, termasuk 12 poin dibidang politik (Qingrun, 2017). Beberapa konsensus penting yang menjadi hasil pada konferensi tahap dua ini adalah demokrasi federal, persamaan hak semua kelompok etnis dan desentralisasi kekuasaan ke daerah otonom (Qingrun, 2017). Keberhasilan yang dicapai ini tidak dapat dilepaskan dari peran China yang mendukung etnis dan pemerintah Myanmar, menyediakan forum bicara untuk oposisi dan pemerintah Myanmar dan lain sebagainya. China telah menjadi mitra yang hebat bagi Myanmar karena membantu dengan sangat intens untuk menciptakan situasi kondusif dan suportif di dalam konferensi ini sehingga antara kedua belah pihak partisipan dapat saling mendengarkan opininya masing-masing dan tercipta draft perjanjian baru yang disetujui.

Pada penutupan konferensi Panglong, Aung San Suu Kyi menyatakan kegembiraannya akan konferensi yang berhasil dengan mengatakan :

*“the agreements signed mark a significant step on the path toward "peace, national reconciliation, and the emergence of a democratic federal Union."*

(Qingrun, 2017)

Walaupun konferensi Panglong ke 21 belum mencapai keberhasilan yang maksimal, kemajuan demi kemajuan akan proses penyelesaian konflik etnis di Myanmar mulai dapat terlihat hasilnya. Peran China dalam usaha perdamaian etnis ini telah mengubah cukup banyak kehidupan dan politik di Myanmar. Perlahan namun pasti, China menciptakan ruang bagi etnis dan pemerintah Myanmar untuk bernegosiasi dan mencapai perdamaian, sesuai dengan kepentingan dan prinsip China di awal yang ingin menciptakan stabilitas di kawasan guna mendukung perekonomiannya. China telah menunjukkan segala politik hegemoninya di dalam usaha Myanmar meraih perdamaian ini, dan kini hanya dalam waktu yang singkat, tahapan-tahapan positif yang telah dilalui Myanmar akan menunjukkan hasilnya pasca konferensi Panglong ke 21 di tahun 2018 berakhir.